DINIYAH PENGELOLAAN **PROGRAM** MADRASAH TAKMILIYAH TERINTEGRASI (MDTT) AL LATIF PADA SEKOLAH DASAR NEGERI SURYODININGRATAN 2 YOGYAKARTA

MANAGEMENT PROGRAM MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH TERINTEGRASI (MDTT) AL LATIF IN SURYODININGRATAN STATE ELEMENTARY SCHOOL 2 YOGYAKARTA

Oleh: Catur Wulan Ratna Ambarsari, Program Studi Manajemen Pendidikan, FIP-UNY (catur.wulan@student.uny.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan program Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Al Latif pada Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta yang mencakup proses perencanan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Setting penelitian di Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi Al Latif pada Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta. Subjek penelitian adalah pengurus program MDTT Al Latif, tenaga pengajar, dan siswa. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta analisis data menggunakan model dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan program MDTT Al Latif secara keseluruhan belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari: (1) Belum adanya buku pedoman program MDTT Al Latif sebagai acuan pengelolaan program MDTT Al Latif sehingga pengurus kurang menguasai Tupoksi masing-masing. (2) Belum validnya kurikulum yang digunakan sehingga pengajar tidak mempunyai bahan ajar yang jelas dalam pelaksanaan pembelajaran program MDTT Al Latif. (3) Tenaga pengajar yang bertugas untuk mengampu program MDTT Al Latif, dari 6 tenaga pengajar hanya 1 tenaga pengajar yang bergelar sarjana pendidikan. (4) Pengorganisasian tidak disertai dengan struktur organisasi dan deskripsi tugas yang jelas sehingga masih terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan tugas. (5) Koordinasi yang dilakukan kurang berjalan dengan maksimal sehingga masih ada ketimpangan dalam proses pelaksanaan program. (6) Evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh sehingga masalah yang ada tidak bisa ditangani dengan baik.

Kata Kunci: pengelolaan program, madrasah diniyah takmiliyah terintegrasi, MDTT

This study aims to describe the management of the Al Latif Integrated Diniyah Takmiliyah Madrasah program at the Suryodiningratan 2 State Elementary School of Yogyakarta which includes the planning, implementation and evaluation processes. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The research is done at Al Latif Integrated Diniyah Takmiliyah Madrasah at the Suryodiningratan 2 State Elementary School of Yogyakarta. The research subjects are the administrators of the Al Latif MDTT program, teaching staff, and students. Methods used to collect data are interviews, observation, and documentation/literature studies. The validity test is done using source triangulation and technique triangulation, while the data is analysed using models provided by Miles & Huberman. The results showed that the process of managing the Al Latif MDTT program as a whole did not go well, this can be seen from: (1) The absence of the MDTT Al Latif program guide as a reference for the management of the Al Latif MDTT program so that the management did not master their respective Auth. (2) Not yet valid curriculum used so that the instructor does not have clear teaching materials in the implementation of Al Latif MDTT program learning. (3) The teaching staff who are in charge of the Al Latif MDTT program, of the 6 teaching staff, is only one teaching staff with a degree in education. (4) Organizing is not accompanied by an organizational structure and clear job descriptions so that there is still inequality in the implementation of tasks. (5) The coordination that is carried out is less effective so that there is still inequality in the process of implementing the program. (6) Evaluation has not been carried out thoroughly so that existing problems cannot be handled properly.

Keywords: program management, integrated diniyah takmiliyah madrasah, MDTT

PENDAHULUAN

Pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan masyarakat. Pendidikan dianggap belum berhasil meningkatkan kecerdasan, sikap, dan keterampilan peserta didik, dan gagal membentuk moral, spiritual, karakter, dan kepribadian bangsa. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya tawuran yang terjadi di negara ini. Tawuran pelajar menunjukkan masih kurangnya penanaman moral, spiritual, karakter, dan kepribadian bangsa.

Pendidikan agama dan keagamaan merupakan upaya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya sehingga siswa dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Jenjang pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar. Pendidikan Agama Islam bagi siswa sekolah dasar (SD) menjadi suatu keharusan dalam penanaman pengetahuan agama Islam.

Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena pendidikan ini merupakan masa penting dan berpengaruh dalam menanamkan akidah dan akhlak mulia peserta didik. SD Negeri yang memakai kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), mata pelajaran PAI hanya mendapat dua jam pelajaran setiap minggunya (2x35 menit). Pada sekolah dasar percontohan atau sekolah model kurikulum 2013, mata pelajaran PAI hanya mendapat tiga jam pelajaran (3x35 menit). Pelajaran PAI yang minim membuat kurang optimalnya pendidikan keagamaan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri dan menjadi problematika guru PAI.

Untuk mengatasi banyaknya materi dan minimnya jam (waktu) mata pelajaran PAI, Kementerian Agama Kota Yogyakarta membuat Program Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) pada Sekolah Dasar Negeri. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2015 dan sampai saat ini sudah ada 15 sekolah yang mengikutinya serta pada tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menargetkan menambah 14 sekolah dasar yang akan mengikuti program Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi pada Sekolah Dasar Negeri (*Okezone News*, 2018).

Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi pada Sekolah Dasar Negeri adalah konsep baru dengan menggabungkan konsep pendidikan formal dan nonformal. Madrasah diniyah yang merupakan lembaga nonformal yang berintegrasi dengan sekolah dan menjadi materi wajib bagi setiap peserta didik yang beragama Islam seperti yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama Nomor: 09/NKB.YK/2015 Pemerintah antara Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tentang Kerjasama dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta.

Salah satu sekolah pelopor program ini adalah Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2 terletak di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan program Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi pada Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 09/NKB.YK/2015 Pemerintah Kota Yogyakarta antara dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tentang Kerjasama dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta. Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi "Al Latif" merupakan nama kegiatan pembelajaran agama yang ada di SD Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta, dilaksanakan di luar jam sekolah.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Saryono (2010: 1) penelitian kualitatif merupakan "penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif".

Jadi penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) pada Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2.

Setting Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di di Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2, yang beralamatkan di Jl. Pugeran No. 21 Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta 55141. Latar belakang memilih Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November-Desember 2018.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif dinamakan sebagai narasumber, partisipan atau informan sehingga sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Pengurus Program MDTT, Tenaga Pengajar Program MDTT, dan Siswa.

Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu "human instrument" yang dapat diartikan bahwa instrumen penelitian adalah si peneliti itu sendiri, maka tidak salah jika Sugiyono (2015: 251), menyebutkan "peran peneliti sebagai key instrument dalam proses penelitian kualitatif.

Keabsahan Data

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode dari Miles & Huberman (1994: 16) bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAAN

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 09/NKB.YK/2015 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang kerja sama dalam bidang pendidikan, pendidikan agama, dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta, maka perlu diadakan pendidikan agama yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Wujud tindak lanjut dari kesepakatan tersebut ialah terbentuknya lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) di Kota Yogyakarta.

Pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, bertempat di SD Suryodiningratan 2, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta diresmikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) Al Latif di SDN Suryodiningratan 2 oleh Walikota Yogyakarta Bapak H. Haryadi Suyuti. Penamaan Al Latif sebagai Nama Madrasah tersebut dipilih langsung oleh Walikota Yogyakarta. Nama kegiatan pembelajaran agama ini adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) Al Latif Sekolah Dasar Negeri Suryodiningratan 2 Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Kurniadin & Machali (2013) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, antara lain:

1) Fayol (Perencanaan, Pengorganisasian, Pemberian Perintah, Pengooordinasian, Pengendalian), 2) Terry (Perencanaan. Pengorganisasian, Pelaksanaan. Pengendalian), 3) Stoner (Perencanaan. Pengorganisasian, Memimpin, Pengendalian), dan 4) Allen (Perencanaan, Penyusunan Kerja, Memimpin, Pengendalian). Selanjutnya Kurniadin & Machali menjelaskan bahwa persamaan dari beberapa pendapat tersebut adalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian. Sedangkan perbedaannya ada pada makna pelaksanaan (actuating) yang disebutkan melalui kata pemberian perintah, pelaksanaan, dan memimpin. Berdasar pada fungsi manajemen dalam Kurniadin & Machali di atas, ada tiga fungsi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perencaaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan Program MDTT Al latif

Perencanaan dilakukan untuk mengetahui secara lebih rinci hal yang akan dilakukan selanjutnya dalam program MDTT Al Latif. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins (1991) yang menyatakan bahwa perencanaan memiliki fungsi yang mencakup penentuan tujuan organisasi, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan ini, dan mengembangkan hierarki rencana yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan.

Perencanaan program MDTT Al Latif diawali dengan disusunnya visi, misi, tujuan, serta rencana kerja MDTT Al Latif. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan kurikulum, perencanaan pembiayaan, perencanaan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program MDTT Al Latif. Hal tersebut sejalan dengan Pedoman Manajemen dan Administrasi Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Kemenag, 2013), yang menyebutkan bahwa perencanaan

melahirkan beberapa hal yang dijadikan acuan bagi pelaksana pengelolaan pendidikan Madrasah Diniyah. Perencanaan mencakup visi, misi, tujuan, dan rencana kerja madrasah diniyah.

Menurut Hamalik (2010) terdapat dua pendekatan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pendekatan yang bersifat *administrative approach* dan pendekatan yang bersifat *grassroots approach*. Perencanaan kurikulum pada program MDTT Al Latif menggunakan pendekatan yang bersifat *administrative approach*. Kurikulum disusun oleh atasan. Dalam hal ini, Kementerian Agama Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron yang bertanggung jawab, kemudian diberikan kepada pengurus MDTT Al Latif. Kurikulum kemudian digunakan sebagai acuan bahan ajar bagi pengajar MDTT Al Latif untuk para siswa MDTT Al Latif.

Hasil dari studi wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti perencanaan kurikulum yang dilakukan pada program MDTT Al Latif ini terlihat kurang matang, pada proses transfer kurikulum dari atas ke bawah masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pengajar yang kurang paham dan bahkan tidak mengetahui bahwa kurikulum dari program MDTT Al Latif ini sudah ada. Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti juga tidak mendapati file kurikulum MDTT Al Latif, Sehingga kurikulum dalam proses pengelolaan MDTT Al Latif masih belum bisa terbukti validasinya.

Nasution (2006) bahwa perencanaan anggaran meliputi honorarium, biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, publikasi, dokumentasi, acara, sewa tempat, administrasi, dan biaya tak terduga. Perencanaan pembiayaan yang dilakukan oleh pengurus MDTT Al Latif juga dialokasikan untuk honorarium, biaya transportasi, konsumsi, dan biaya tak terduga lainnya.

Perencanaa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak penurus MDTT Al Latif melibatkan pihak yang bertanggung jawab, yaitu kepala MDTT Al Latif dengan sepengatahuan kepala sekolah SDN Suryodiningratan 2.

Perencanaan pembiayaan untuk program MDTT Al Latif berdiri sendiri yang diurus oleh bendahara program MDTT Al Latif dengan menyusun proposal guna untuk mencairkan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tenaga pendidik menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 (1) bahwa tenaga pendidik mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Empat kompetensi tersebut belum bisa ditemui dalam diri pendidik/pengajar MDTT Al Latif. Hal ini terbukti dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap daftar pendidikan pendidik/pengajar MDTT Al Latif yang menunjukkan bahwa dari 6 tenaga pendidik/pengajar yang bertugas untuk mengampu program MDTT Al Latif hanya 1 tenaga pendidik/pengajar yang bergelar sarjana pendidikan

Bafadal (2004) berpendapat bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerja sama dalam pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan dengan efektif dan efisien. Perencanaan sarana berupa barang habis pakai seperti ATK di masukan dalam proposal pengadaan dana yang akan diajukan ke Kementrian Agama, yaitu dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perencanaan prasarana utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, kantor, dan yang lainnya terintregrasi dengan prasarana yang ada di SDN 2 Suryodiningratan. Sehingga prasarana yang digunakan sama dengan prasarana yang ada di SDN 2 Suryodiningratan.

Pelaksanaan Program MDTT Al latif

Pendapat dari Dale (1967) mengemukakan tiga langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu (1) menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan; (2) membagi pekerjaan atau kegiatan menjadi bagian yang lebih kecil yang bisa dilakukan oleh satu orang; dan (3) menyediakan sarana atau mekanisme

koordinasi, sehingga tidak ada kesalahan dalam koordinasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada program MDTT Al Latif, peran dan tugas pokok pengurus dalam penyelenggaraan program MDTT Al Latif antara lain sebagai berikut:

1) Mengkaji kebijakan sekolah, kondisi lingkungan sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana prasarana. 2) Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran berdasarkan hasil kajian yang telah terumuskan. 3) Melaksanakan rencana kerja. Rencana kerja MDTT Al Latif dilaksanakan oleh sekolah. salah warga satunya guru dalam menyampaikan materi mengenai penguatan Mata Pelajaran Agama Islam. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. 5) Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah, kepala MDTT Al Latif dengan tembusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron dan Instansi terkait lainnya.

Tugas pokok pengurus yang telah diturunkan, mendorong pihak sekolah membentuk pengurus organisasi khusus untuk mengelola MDTT Al Latif. Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa sudah ada pembentukan tim yang menangani MDTT Al Latif, tim tersebut terdiri dari kepala program, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, tata usaha, bendahara, humas dan publikasi, serta bidang perlengkapan.

Hal lain yang ditemui oleh peneliti bahwa dalam penyusunan pengurus tersebut belum ditentukan struktur organisasi sehingga tugas masing-masing pihak belum secara maksimal dijalankan sesuai dengan tugas yang diamanahkan.

Evaluasi Program MDTT Al latif

Menurut Arikunto, S. & Jabar, C. S. A. (2008), evaluasi merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kegiatan, yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Farida Yusuf dalam Kurniadin & Machali

(2013) menyampaikan dua model evaluasi, yaitu formatif dan sumatif. Model evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui informasi dan membantu memperbaiki program yang sedang dilaksanakan, sedangkan model evaluasi sumatif dilakukan di akhir program untuk menilai apakah program diteruskan, direvisi, atau dihentikan.

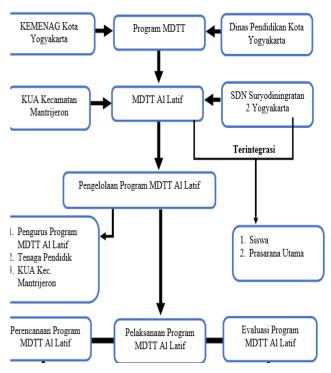
a. Evaluasi formatif

Evaluasi formatif yang dilakukan dalam program MDTT Al Latif masih seputar proses pelaksanaan program, pihak MDTT Al Latif belum mengadakan evaluasi program secara menyeluruh. Pihak yang ikut dalam proses evaluasi hanya sekadar pihak sekolah dan pengajar dari program MDTT Al Latif, sedangkan pihak luar seperti KUA kecamatan Mantrijeron dan pihak Dinas Pendidikan kota Yogyakarta masih belum terlibat. Evaluasi program secara menyeluruh akan membuat penyelenggara program bisa melihat secara rinci kekurangan dan kelebihan dari setiap komponen program. Sehingga bisa mempermudah penyelenggara untuk membuat tindakan yang dapat membantu program menjadi lebih baik. Pelaksanaan evaluasi formatif program MDTT Al Latif sudah memiliki waktu khusus, yaitu setiap awal semester atau enam bulan sekali. Evaluasi yang dilakukan dengan cara rapat evaluasi yang diikuti oleh pengurus dan pengajar MDTT Al Latif.

b. Evaluasi sumatif

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Nomor: 09/NKB.YK/2015 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tentang Kerja sama dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta tentang lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintegrasi (MDTT) Al Latif yang akan berjalan selama 4 tahun, dan setelah itu akan diadakan evaluasi program untuk menilai apakah program diteruskan, direvisi, atau dihentikan. Berhubung program ini belum

berjalan selama 4 tahun maka evaluasi sumatif belum bisa dilakukan pada program MDTT Al Latif ini.



Gambar Peta Pengelolaan MDTT Al Latif

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan program Madrasah Diniyah Takmiliyah Terintregrasi (MDTT) Al Latif pada SD Negeri Suryodiningratan 2 Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perencanaan program MDTT Al Latif, belum dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi hal-hal yang bersifat teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan. Hal ini bisa dilihat dari, belum adanya buku pedoman program MDTT Al Latif sebagai acuan pengelolaan program MDTT Al Latif. Perencanaan kurikulum pada program MDTT Al Latif juga belum dilaksanakan secara baik hal ini terbukti dengan tidak validnya kurikulum yang digunakan sehingga pengajar tidak mempunyai bahan ajar yang jelas dalam pelaksanaan pembelajaran program MDTT Al Latif. Perencanaa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pengurus

MDTT Al Latif dipertanggungjawabkan oleh kepala MDTT Al Latif dengan sepengetahuan kepala sekolah SDN Suryodiningratan 2. Perencanaan tenaga pendidik dilakukan dengan kerja sama dari pihak pengurus dan Kantor Urusan Agama kecamatan Mantrijeron juga belum dilakukan dengan baik karena dari 6 tenaga pendidik/pengajar yang bertugas untuk mengampu program MDTT Al Latif hanya pendidik/pengajar yang bergelar sarjana pendidikan. Perencanaan pembiayaan untuk program MDTT Al Latif berdiri sendiri yang diurus oleh bendahara program MDTT Al Latif dengan menyusun proposal guna untuk mencairkan dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perencanaan sarana berupa barang habis pakai seperti ATK di masukkan dalam proposal pengadaan dana yang akan diajukan ke Kementrian Agama, yaitu dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perencanaan prasarana utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, kantor, dan yang lainnya terintegrasi dengan prasarana yang ada di SDN Suryodiningratan. Sehingga prasarana digunakan sama dengan prasarana yang ada di SDN 2 Survodiningratan.

Pelaksanaan dalam pengorganisasian program MDTT Al Latif dilakukan hanya dengan membentukan sebuah susunan pengurus organisasi yang bekerja sebagai pengelola program. Pengelola dalam program MDTT Al Latif yang tersusun merupakan guru-guru yang diberi tambahan tugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program. Pengorganisasian tidak disertai dengan struktur organisasi dan deskripsi Tupoksi yang jelas sehingga masih terjadinya ketimpangan dalam hal pelaksanaan tugas.

Evaluasi program MDTT Al Latif meliputi evaluasi formatif dan sumatif. Pelaksanaan evaluasi formatif program MDTT Al Latif sudah memiliki waktu khusus, yaitu setiap awal semester atau enam bulan sekali. Hingga saat ini belum ada evaluasi khusus yang membahas permasalahan konten program, seperti

halnya permasalahan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan memerlukan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan hanyalah pada bagian terkecil program. Sedangkan untuk evaluasi sumatif belum bisa dilalukan karena program MDTT Al Latif ini belum berjalan selama 4 tahun.

Saran

- Evaluasi program secara menyeluruh meliputi tiaptiap komponen program hendaknya dilakukan.
 Sehingga pihak pengurus program MDTT Al Latif lebih bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan program.
- Perlunya membuat pedoman pengelolaan program MDTT Al Latif agar semua pengurus dapat paham dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam menjalankan program.
- Membuat jadwal rutin untuk melakukan koordinasi dengan pihak KUA Kecamatan Mantrijeron sehingga komunikasi antara kedua belah pihak tidak terhambat dan masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan program dapat terselesaikan dengan baik.
- 4. Perlunya pemantapan dan sosialisasi kurikulum yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan program dari KUA Kecamatan Mantrijeron kepada pengurus dan pengajar program MDTT Al Latif.
- Perlunya mengevaluasi kembali keefektifan program MDTT yang telah berjalan sehingga dapat diperoleh kesimpulan, apakah program diteruskan, direvisi, atau dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. & Jabar, C. S. A. (2008). Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan (2nd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, I. (2003). Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar: Dari sentralisasi menuju desentralisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Dale, E. (1967). *Organizations*. Amerika: American Management Associations.
- Hamalik, O. (2010). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hariandja, M. T. E. (2005). *Manajemen sumberdaya manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kurniadin, D. & Machali, I. (2013). *Manajemen pendidikan: Konsep dan prinsip pengelolaan pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kementerian Agama RI (2013). Pedoman manajemen dan administrasi pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Jakarta: Kemenag.
- Kesepakatan Bersama Nomor: 09/NKB.YK/2015 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Kerjasama dalam bidang pendidikan, pendidikan agama dan keagamaan, pengabdian masyarakat dan pemberdayaan sumber daya Kota Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Pedoman manajemen* dan administrasi pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Jakarta: Kemenag.
- Miles, M. B., Huberman A. M., & Saldana J. (2014).

 Qualitative data analysis: An expanded sourcebook/Matthew B. Miles, A. Michae Huberman, Johny Saldana (3 Ed.). Arizona: Arizona State University.
- Nasution, A. H. (2006). *Manajemen Industri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ris. (2018 05 Januari). 14 Sekolah dasar di yogyakarta ditargetkan ikut program madrasah diniyah 2018. Diambil pada tanggal 11 Maret 2018 dari, https://news.okezone.com/read/2018/01/05/65/1840422/14-sekolah-dasar-di-yogyakarta-ditargetkan-ikut-program-madrasah-diniyah-2018.html
- Robbins, S. P. (1991). *Management* (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Saryono, (2010). *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono, (2015.) Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.